

PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI PADI-TERNAK DALAM UPAYA PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN EVALUASI

Chairul Muslim

*Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan amanat Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan oleh Presiden tanggal 11 Juni 2005, bangsa ini perlu membangun ketahanan pangan yang mantap. Merespon sasaran dalam RPPK tersebut, Deptan dalam dokumen "Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005-2010", telah membuat arah kebijakan pembangunan pertanian dengan menyusun arah pengembangan dan sasaran lima komoditas pangan utama, yaitu mempertahankan swasembada padi berkelanjutan, serta mencapai swasembada untuk komoditas jagung pada tahun 2007, kedelai tahun 2015, gula tahun 2009 dan daging sapi tahun 2010 (dalam Bab IV buku RPPK, 2005).

Terkait dengan daging sapi, ini adalah untuk kesekian kalinya pemerintah mencanangkan swasembada daging, dengan target minimal 90 persen kebutuhan daging dalam negeri dipenuhi dari produksi dalam negeri dan ketergantungan terhadap impor daging sapi dan ternak lainnya serta produk asal ternak dapat dikurangi (Sudarjat, 1999) dan (Sudarjat, 2003). Nampak cukup sulit mencapai target ini, karena hingga kini belum banyak perubahan yang berarti bagi pencapaian target tersebut.

Sejalan dengan perbaikan mutu kehidupan masyarakat, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini permintaan konsumsi daging sapi potong terus meningkat dan tampaknya telah melebihi kemampuan produksi daging sapi dalam negeri. Akibatnya jumlah impor dalam berbagai bentuk cenderung juga meningkat. Dalam merespon situasi ini pemerintah telah mencanangkan berbagai terobosan melalui beberapa program dalam kebijakan pembangunan peternakan.

Salah satu dari program tersebut adalah program Sistem Integrasi Padi – Ternak (SIPT) lazimnya disebut juga dengan istilah CLS (Crop Livestock System). Tujuan program SIPT ini adalah pengembangan penggemukan ternak sapi potong berbasis tanaman pangan. Program ini pada intinya mengupayakan peningkatan produksi daging ternak sapi potong dan sekaligus upaya peningkatan produksi pangan melalui kegiatan pemeliharaan sapi pada areal lahan tanaman pangan beririgasi. Dasar pertimbangan dari program ini adalah kegiatan produksi

pertanian tanaman pangan dan ternak dengan prinsip *zero waste*. Keterpaduan padi ternak ini diharapkan dapat menghemat penggunaan pakan ternak, pupuk dan lahan, serta biaya semurah mungkin sehingga produksi ternak dan padi yang dihasilkan lebih meningkatkan pendapatan petani.

Tulisan ini ingin melihat lebih jauh konsep dari Sistem Integrasi Padi-Ternak (SIPT) atau CLS (Crop Livestock System), penerapannya di berbagai lokasi serta tinjauan evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan dari program ini. Uraian akan diawali dengan tinjauan terhadap konsep SIPT atau CLS diakhiri dengan suatu evaluasi singkat terhadap program yang ada serta saran perbaikan ke depan.

KONSEP SIPT (SISTEM INTEGRASI PADI – TERNAK)

Program SIPT (Sistem Integrasi Padi-Ternak) merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan produksi padi, daging, susu, dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani (Haryanto, 2002). Badan Litbang Pertanian telah meneliti dan mengkaji Sistem Integrasi Padi-Ternak (SIPT) dengan pendekatan *Zero waste*. Yang dimaksud *Zero waste* adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal seperti pemanfaatan jerami sebagai pakan ternak dan kotoran ternak sapi untuk diproses menjadi pupuk organik. Artinya memperbaiki unsur hara yang dibutuhkan tanaman sehingga tidak ada limbah yang terbuang (Dirjen Bina Produksi Peternakan, 2002)

Ada tiga komponen teknologi utama dalam SIPT yaitu (a).Teknologi budidaya ternak, (b) teknologi budidaya padi, dan (c) teknologi pengolahan jerami dan kompos. Ketiga komponen teknologi tersebut dapat diintegrasikan secara sinergis, maka pengembangan SIPT ini dilaksanakan dengan pendekatan kelembagaan (Haryanto dkk., 2002). Yang dimaksud pendekatan kelembagaan disini adalah kelompok ternak dan kepemilikan lahan sawah tetap ada, dimana kelompok ternak tetap menjamin kepemilikan secara individu, namun kegiatan individu merupakan satu kesatuan dari kegiatan kelompok seperti pengumpulan jerami padi, pengadaan saprodi dan pemasaran hasil.

Program SIPT dilaksanakan sejak tahun 2002 dilokasi yang merupakan lahan sawah irigasi, dan petaninya juga memelihara ternak sapi. Kegiatan SIPT ini merupakan bagian dari kegiatan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu), realisasi awal pengembangan adalah dilaksanakan pada lahan seluas 50 ha dan didistribusikan 80 ekor ternak sapi untuk 2 kelompok petani, di 11 Provinsi serta di 20 kabupaten. Dari 20 kabupaten tersebut juga dialokasikan dana dalam bentuk BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) guna pengadaan ternak sapi, bantuan kandang, pakan penguat, tempat pemrosesan jerami, tempat pemrosesan kompos dan bantuan obat-obatan serta vaksin.

UPAYA PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING DI INDONESIA

Dalam upaya memenuhi permintaan daging konsumen dalam negeri dan ternak sapi potong, pemerintah telah berupaya untuk memenuhinya melalui upaya-upaya pengembangan berbagai program, baik melalui pola fattening, breeding maupun upaya pembesaran bakalan ternak sapi potong. Pada tahun anggaran 2002 pemerintah telah mencanangkan upaya pengembangan ternak sapi potong melalui kegiatan Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Peternakan, dan kegiatan tersebut diaplikasikan pada berbagai bentuk kegiatan pengembangan ternak potong khususnya sapi potong.

Pengembangan Kawasan Agribisnis Peternakan pada dasarnya merupakan suatu model/pola pengembangan wilayah atau daerah yang diarahkan pada keterpaduan usahatani antara ternak dan tanaman pangan, perkebunan dan perikanan (kawasan peternakan terpadu) dan kawasan peternakan khusus yang memiliki kegiatan utama usaha peternakan seperti lahan umum, ranci dan kawasan khusus peternakan (KUNAK). Dimana pengembangan dan peningkatannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga mengarah pada wilayah/daerah yang berkembang dan mandiri dan memiliki nilai ekonomis (Dir. Jend. Bina Prod. Peternakan, 2002)

Sementara dalam rangka upaya pengembangan ternak sapi potong, pada tahun 2003 upaya pengembangan ternak tersebut menyebar di 29 Provinsi, sementara pengembangan ternak sapi perah di alokasikan pada 5 Provinsi utama, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sedangkan pengembangan ternak kerbau terkonsentrasi di 5 Provinsi juga yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Jambi. Pengembangan ternak kambing dan domba terkonsentrasi di 5 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Gorontalo, Jawa Barat, Banten dan Provinsi Riau.

Program pengembangan ternak sapi potong, pada awalnya upaya ini dilakukan melalui proyek pengembangan ternak sapi potong sistem "Sumba Kontrak", dan upaya ini cukup berhasil dalam memacu kinerja peternakan rakyat. Program ini diikuti oleh program-program susulan seperti Proyek Panca Usaha Ternak Potong (PUTP) dan terakhir adalah Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang didalamnya meliputi berbagai proyek seperti Program Peningkatan Rakyat Terpadu (P2RT). Program lainnya yang terkait dengan usaha perbaikan usaha peternakan rakyat adalah Program Pengembangan Kawasan Agribisnis Peternakan yang didalamnya terkandung pula kegiatan Sistem Integrasi Padi-Ternak (SIPT).

Kesemua program tersebut di atas pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging nasional. Program yang dilaksanakan mencoba mengembangkan usaha peternakan rakyat dari kegiatan hulu sampai ke

hilir. Kegiatan hulu lebih ditekankan pada program peningkatan mutu pakan ternak, terutama di wilayah-wilayah tertentu yang masih terkendala masalah pakan terutama pada saat musim kemarau. Disisi lain teknologi pakan yang telah di sosialisasikan ke peternak belum sepenuhnya dapat diterapkan, sebagai misal sistem "Amoniasi Jerami" yang sebenarnya mudah dan murah, namun pada kenyataannya sulit diterapkan karena peternak belum terbiasa dan belum yakin dengan hasilnya.

EVALUASI TERHADAP UPAYA PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING DI INDONESIA

Evaluasi hasil penelitian Yusdja dkk, (2004) mengemukakan bahwa sasaran program pengadaan daging sapi adalah meningkatkan kelahiran, menurunkan tingkat kematian, meningkatkan populasi, meningkatkan pasokan daging sapi dari produksi dalam negeri, menurunkan impor sapi bakalan dan menurunkan impor daging. Dengan demikian kebijakan swasembada daging sapi dapat dievaluasi melalui keberhasilan sasaran yang akan dicapai. Ada tiga kunci kriteria keberhasilan yakni a) bagaimana perkembangan populasi khususnya di daerah sentra produksi yang menjadi suplier utama penghasil daging dan b) bagaimana perkembangan impor sapi bakalan serta c) bagaimana perkembangan jumlah pemotongan ternak di daerah yang ada hubungannya dengan pengiriman sapi potong ke wilayah konsumsi. Ketiga kriteria ini cukup mewakili keenam sasaran tersebut.

Sasaran kunci kebijakan swasembada daging adalah mencari tambahan kekurangan produksi daging dari dalam negeri. Produksi daging pada tahun 1999 adalah 350 ribu ton atau jumlah ternak yang dipotong sebanyak 1,7 juta ekor. Kebutuhan pada awal tahun 2005 diproyeksikan sebesar 460 ribu ton atau diperlukan tambahan sebesar 110 ribu ton atau 550 ribu ekor sapi dibandingkan tahun 1999. Untuk mendapatkan produksi sebesar itu diperlukan tambahan populasi 3 juta ekor per tahun. Pemerintah telah mencanangkan berbagai program untuk mencapai status swasembada tersebut. Namun program-program tersebut dinilai tidak berjalan efektif sehingga dampaknya pun sangat kecil dibandingkan sasaran yang dicapai.

Kegagalan program-program ini terutama karena program itu sendiri tidak jelas rinciannya dan baru pada batas-batas pemikiran atau belum operasional sehingga penjabaran-penjabaran dalam bentuk program hanya berlindung dibalik pemikiran-pemikiran di atas tetapi isi program tidak konsisten dengan sasaran. Peran pemerintah sangat kecil untuk dapat mempengaruhi langsung pencapaian sasaran, karena pihak masyarakat mempunyai peran yang lebih besar. Dari pihak masyarakat itu tidak terlibat dalam kebijakan dan rincian program. Pengadaan ternak hidup untuk kebutuhan DKI misalnya sangat tergantung pada pedagang dan

stok populasi yang tersedia bukan kepada rencana-rencana yang dibuat pemerintah. Demikian juga dengan sapi impor bakalan sangat tergantung pada kemampuan pihak swasta, pemerintah hanya dapat melancarkan kran impor tersebut.

Tabel 1 jelas memperlihatkan bahwa impor sapi bakalan terus meningkat sepanjang tahun bahkan pada tahun 2002 dan 2003 telah melonjak antara 2,4 sampai 2,6 kali dibandingkan tahun 1999 yakni sebelum program dicanangkan. Sementara jumlah pemotongan sapi domestik di DKI terus menurun sekali pun di Jawa Barat terus meningkat karena sebagian adalah pemotongan ternak sapi bakalan impor. Sebagian besar daging sapi bakalan impor untuk konsumsi DKI, dampaknya adalah penurunan permintaan sapi-sapi domestik. Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa semua program-program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian swasembada sama sekali signifikan tidak efektif.

Tabel 1. Impor Sapi Bakalan dan Pemotongan, DKI dan Jabar, 1999-2003

Tahun	Impor	Potong DKI	Potong Jabar	Rasio
1999	159.548	120.262	281.261	0,75
2000	296.653	90.761	274.516	0,31
2001	289.525	82.977	313.518	0,29
2002	429.615	76.463	254.309	0,18
2003	387.168	62.822	328.064	0,16

Sumber: ABS dalam Livecorp Australia. Brisbane.

KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PROGRAM SIPT

Keunggulan Program

Berikut ini adalah hasil evaluasi terhadap kinerja program SIPT di beberapa sentra produksi daging sapi potong di Indonesia (DI Provinsi NTB, Jawa Timur dan Jawa Barat) hasil penelitian Yusdja dkk. (2004).

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi NTB bagian wilayah kawasan timur merupakan salah satu Provinsi yang telah melaksanakan kegiatan program P3T yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan diantaranya adalah program Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat kegiatan SIPT ditempatkan di dua Kabupaten yaitu Lombok-Barat dan Kabupaten Bima. Secara rinci alokasi kegiatan pelaksanaan SIPT berdasarkan lokasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Pelaksanaan Kegiatan SIPT di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2002

No.	Lokasi			Nama kelompok	Jumlah ternak (ekor)
	Kabupaten	Kecamatan	Desa		
1.	Lombok Barat	Tanjung	Jenggala	- Kleang I - Seruni - Jenggala	200
2.	Bima	Madapangga	Rade	- Bob Utama - Keate Ngapi - Cinta Manis - Tani Utama	200

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan

Disamping adanya program P3T, diwilayah Nusa Tenggara Barat juga dilakukan upaya terobosan pengembangan ternak sapi potong diantaranya adalah melalui program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dimana alokasi dananya disamping bersumber dari kegiatan Program Ketahanan Pangan (PKP), juga bersumber dari kegiatan Program Pengembangan Agibisnis (PPA). Selama empat tahun terakhir (2000-2003) kegiatan pengembangan ternak sapi potong yang didanai oleh BLM terus mengalami peningkatan dan menunjukkan keberhasilannya. Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa selama kurun waktu empat tahun (2000-2003), dalam kegiatannya program tersebut telah menyalurkan ternak sapi potong sebanyak 2.669 ekor, melibatkan 1.181 petani yang tergabung dalam 40 kelompok tani. Dan jumlah sapi pada posisi terakhir telah mengalami perkembangan menjadi 3488 ekor, atau telah bertambah 819 ekor (30,68%).

Tabel 3. Perkembangan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Nusa Tenggara Barat Selama Empat Tahun Terakhir (thn 2000 - 2003)

Tahun	Jumlah		Asal dana	Jumlah ternak (ekor)		
	Kelompok	Anggota		Awal	Akhir	(%)
2000	8 klp	300	PKP	450	626	39,11
2001	13 klp	296	PPA	442	546	23,53
2002	8 klp	210	PPA	720	1.083	50,41
2003	11 klp	375	PPA	1.057	1.233	16,65
Jumlah = 40 klp		1.181	-	2.669	3.488	30,68

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat, thn 2004 (Data diolah)

Sementara itu secara parsial keragaan pengembangan ternak sapi potong di Kabupaten Lombok barat, secara umum menunjukkan bahwa dalam upaya mengatasi permintaan daging ternak sapi potong semakin meningkat, maka upaya yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat melalui kebijakan Dinas Peternakan setempat adalah adanya perbaikan genetik dari sapi-sapi yang ada melalui upaya kegiatan Inseminasi Buatan (IB) yang telah dirintis

sejak tahun 1976. Hasil IB yang paling diminati masyarakat peternak adalah IB "Simba" (Simental - Bali), dimana disamping memiliki keturunan yang baik (besar) harganya pun mahal. Untuk pedet yang baru lahir dihargai Rp 1,5 juta/ekor.

Dalam upaya pengembangan ternak sapi potong, di wilayah Lombok Barat juga dilakukan pengembangan berdasarkan pewilayahan pengembangan, dimana untuk kawasan Wilayah Kabupaten Lombok Barat bagian Utara seperti daerah Bayan, Gangge, Tanjung, Sekotong dan tempat lainnya lebih ditekankan untuk pengembangan pola breeding. Sementara untuk kawasan wilayah Kabupaten Lombok Barat bagian Tengah seperti daerah Narmada dan Wirasinga lebih diarahkan untuk pengembangan ternak sapi potong sistem fattening. Sistem pengembangan ternak sapi potong secara breeding tersebut sebenarnya merupakan pola bergilir yang dulu pernah dirintis yang terkenal dengan nama pola "Sumba Kontrak". Namun pola tersebut telah mengalami "penyempurnaan" sistem aturan main dan saat ini pola tersebut diberi nama sistem "Tastura" yang sebenarnya merupakan akronim dari kata-kata mutiara dari wilayah Lombok Tengah yaitu "Tatas Tuhu Tresna" yang mana pola ini lebih tepat dikatakan pemeliharaan ternak sapi dengan sistem induk bergilir.

Hal ini disesuaikan berdasarkan kondisi agroekosistem setempat. Di wilayah Kabupaten Lombok Barat bagian tengah lebih didominasi oleh lahan sawah beririgasi teknis. Sehingga tepat untuk upaya pengembangan sistem penggemukan dengan asumsi adanya kelebihan limbah hasil pertanian yang mencukupi untuk pengembangan usaha tersebut.

Pelaksanaan program-program pengembangan ternak sapi potong di wilayah Kabupaten Lombok Barat tidak sepenuhnya berjalan mulus, terutama program-program yang bersifat "Top Down". Disamping diwarnai oleh ketidak konsistennya peraturan yang sering "dianggap" berubah-ubah juga kadangkala "Juklak" yang dibuat di pusat tersebut terkesan banyak kelemahan dan kurang bisa diterapkan di daerah. Sehingga koreksi terhadap aturan-aturan yang ada di juklak tersebut tampaknya perlu dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman penerapan di lapangan.

Provinsi Jawa Timur

Salah satu kasus di wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya wilayah Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa dalam upaya pengembangan ternak sapi potong, kebijakan lebih diarahkan untuk pengembangan ternak skala rakyat. Wilayah Blitar Utara yang secara umum lebih banyak lahan sawahnya diarahkan untuk penggemukan ternak sapi potong. Sementara wilayah Blitar Selatan yang lebih didominasi oleh lahan kering berdasarkan kebijakan daerah, maka wilayah ini diarahkan untuk pengembangan ternak sapi potong dengan sistem *breeding*.

Saat ini di wilayah Blitar telah dilaksanakan program pengembangan ternak sapi potong dengan Sistem Integrasi Padi-Ternak (SIPT). Pelaksanaan

program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2002 dan 2003. Pada tahun anggaran 2002 proyek tersebut telah dialokasikan di wilayah Kecamatan Wlingi khususnya Desa Klemuran dan kelompok tani yang diikuti sertakan adalah kelompok tani "Among Tani". Pada tahun anggaran 2003 kegiatan yang sama dialokasikan di Desa Siraman Kecamatan Kesamben dan melibatkan dua kelompok tani yaitu Kelompok Tani "Rejeki Mulyo" dan Kelompok Tani "Ngudi Makmur (Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, 2003). Pada anggaran tahun 2002 telah dialokasikan ternak sapi potong betina sebanyak 86 ekor, sementara pada tahun 2003 sebanyak 40 ekor.

Adanya alokasi kegiatan SIPT di wilayah Blitar khususnya Kecamatan Wlingi tersebut menyebabkan minat masyarakat untuk mengembangkan ternak sapi potong menjadi semakin besar. Hanya saja sehubungan sebagian besar peserta proyek merupakan peternak pemula, hal ini tentu membutuhkan bimbingan teknis secara terpadu, baik teknis pertanian maupun peternakan yang selama ini terkesan kurang adanya koordinasi. Secara teknis pelaksanaan program CLS di wilayah ini dapat dikatakan berhasil, dimana limbah jerami dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara hasil kotoran ternak (kompos) juga telah dimanfaatkan oleh anggota kelompok.

Sementara keragaan pengembangan ternak sapi potong di Magetan bahwa wilayah Kabupaten Magetan merupakan salah satu sentra penggemukan ternak sapi potong di Jawa Timur. Keragaan dilapangan menunjukkan bahwa minat petani terhadap ternak yang digemukkan lebih memilih jenis Bos Taurus seperti Simental, Limausin atau jenis Brangus. Hal ini disamping jenis tersebut pesat pertumbuhannya, dalam pemeliharaannya terutama dalam hal pakan yang tidak terlalu sulit. Jangka waktu penggemukan biasanya diperlukan waktu 6 sampai 8 bulan. Dengan tingginya permintaan petani ternak akan jenis tersebut menyebabkan harga bakal/pedet jenis sapi tersebut menjadi mahal. Pemanfaatan limbah pertanian setempat semata tampaknya tidak mencukupi. Untuk mendapatkan kualitas sapi kereman yang baik maka peternak tidak sepenuhnya mengandalkan pakan hijauan. Pakan ternak jenis lainnya seperti dedak katul maupun ubi kayu merupakan pakan pilihan yang banyak digunakan oleh para peternak. Konsep pengembangan "*Zero Waste*" dimana pemanfaatan limbah pertanian maupun limbah peternakan di wilayah ini sudah lama diberlakukan dan hasilnya baik.

Provinsi Jawa Barat

Kegiatan proyek dari program SIPT yang dialokasikan di wilayah Provinsi Jawa Barat pada pelaksanaan tahun anggaran 2002 dialokasikan di empat wilayah Kabupaten, yaitu masing-masing di wilayah Kabupaten Subang, Krawang, Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Salah satu lokasi penelitian pengembangan ternak sapi potong di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Majalengka. Keragaan pengembangan ternak sapi potong di Majalengka seperti kasus di daerah

lainnya bahwa pelaksanaan kegiatan SIPT di Kabupaten Majalengka seperti kegiatan PTT, kegiatan KUAT yang terangkum dalam satu program yang bernama P3T yaitu Program Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu, yang didalamnya terdapat unsur pengembangan ternak khususnya ternak sapi potong yang masuk dalam kegiatan SIPT merupakan sub kegiatan dari P3T tersebut.

Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan SIPT yang di alokasikan di Desa Pasirmuncang Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Melibatkan dua kelompok tani yaitu kelompok tani Walahar dan kelompok tani Cisampih. Berdasarkan hasil pengamatan lapang dari jumlah bantuan sapi yang diterima sebanyak 80 ekor dimana 40 ekor diperuntukkan bagi usaha penggemukan dan 40 ekor diperuntukkan usaha pembibitan. Dari jumlah tersebut sebagian anggota telah menikmati hasilnya baik berupa hasil gaduhan berupa ternak penggemukan maupun pedet.

Kelemahan Program

Kasus kegagalan proyek SIPT (CLS) di Kelompok ternak di Lombok Barat merupakan salah satu contoh kurang bisa operasionalnya juklak dilapangan. Sementara itu pihak Dinas Peternakan sendiri selama ini belum pernah melakukan evaluasi terhadap program-program pengembangan ternak, terutama yang berkaitan dengan program BLM.

Sistem pengembangan ternak sapi potong secara umum lebih diarahkan pada sistem pembibitan walau masih menghadapi jarak beranak yang masih panjang. Kebijakan ini didasarkan atas kondisi meningkatnya permintaan ternak bibit dari beberapa wilayah di Indonesia bahkan dari luar negeri (Malaysia). Dengan masuknya daging impor ilegal serta semakin meningkatnya impor daging, menyebabkan usaha penggemukan sapi potong kurang mendapat perhatian. Kendala lainnya adalah masalah pakan yang menyebabkan pertambahan bobot badan rendah. Sebagai akibatnya kegiatan penggemukan ternak sapi potong keuntungannya rendah sehingga sulit untuk bersaing dipasaran.

Sebagai dasar adanya kebijakan pengembangan ternak sapi potong diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah pengurusan ternak yang cukup serius melalui pengiriman ternak hidup antar pulau yang terus menerus, serta adanya pemotongan ternak lokal. Selain itu mulai ada permintaan bibit ternak sapi asal Lombok dari Negara Malaysia akhir-akhir ini dan tampaknya akan terus berlanjut. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka pemerintah daerah setempat melalui Dinas Peternakan mengambil langkah upaya pengembangan pembibitan.

Pokok permasalahan yang lebih umum adalah bahwa di Indonesia belum tersedia peraturan yang menekankan perlu pembibitan untuk sapi bibit, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ternak sapi bibit yang di ekspor tersebut

merupakan sapi-sapi kualitas terbaik. Hal ini harus dihindari karena akan ada pengurusan "Plasma Nutfah" ternak sapi setempat.

Di Jawa Timur dilihat dari peta peternakan sapi sangat potensial akan ketersediaan limbah pertanian, sehingga disamping merupakan lumbung pertanian juga merupakan lumbung ternak secara nasional. Tetapi dalam pelaksanaan program SIPT terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti adanya penyusutan lahan pertanian khususnya pada kelas lahan beririgasi setengah teknis, lahan beririgasi sederhana, lahan tadah hujan maupun lahan pasang surut. Penyusutan luas areal lahan pertanian tersebut disebabkan oleh berbagai hal, antara lain adanya konversi lahan pola pemukiman, pola industri, pola sarana dan prasarana serta pola-pola lainnya (Pakpahan dkk., 1993).

Suatu hal yang menjadi perhatian bagi Departemen Pertanian bahwa *pertama*, pelaksanaan program SIPT tidak saja berdampak terhadap semakin berkurangnya areal lahan pertanian, juga bagi pengembangan usaha ternak sapi potong yang masih bersifat tradisional yang sangat tergantung pada ketersediaan lahan pertanian. Tidak saja terhadap semakin menyusutnya populasi ternak sapi, namun juga menyebabkan muncul perpindahan profesi peternak sapi potong ke profesi lainnya diluar peternakan bahkan diluar pertanian. *Kedua*, ada dugaan bahwa penurunan populasi tersebut disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah kejenuhan usaha yang disebabkan oleh adanya keterbatasan lahan pertanian yang cenderung berkurang serta beralih fungsi dan kegunaan. Usaha pengembangan ternak di pedesaan merupakan usaha yang bersifat *land base*, artinya mengandalkan lahan sebagai basis usaha, dengan semakin terbatasnya lahan tersebut ternyata tidak hanya berdampak terhadap semakin tergusurnya ternak namun juga berdampak terhadap tergusurnya profesi masyarakat peternak yang harus beralih ke profesi lain dalam upaya mempertahankan kehidupan ekonomi rumah tangganya (Adnyana dkk., 1996).

Hal lain yang cukup penting, bahwa penurunan populasi ternak sapi potong tersebut juga disebabkan oleh adanya dampak impor daging ilegal yang secara langsung berdampak harga daging semakin menurun. Secara tidak langsung akan berdampak harga ternak potong lokal semakin rendah. Kondisi ini membawa dampak buruk pada peternak sapi potong dalam negeri yang cenderung mengalami banyak kerugian.

Di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Majalengka permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan utama dari kelompok peternak adalah pemeliharaan ternak sapi, terutama pembuatan pakan ternak melalui proses fermentasi jerami dalam upaya pemenuhan kebutuhan pakan ternak. Selain pembuatan pakan ada kegiatan pembuatan kompos dari limbah ternak yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik bagi masyarakat sekitar terutama bagi anggota kelompok. Melalui proses "Orgadek" diharapkan kelompok tani tersebut mampu menghasilkan kompos jadi sebanyak 1 ton perbulan. Kompos belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh petani karena alasan proses pengangkutan dari lokasi kompos ke sawah dirasakan masih memberatkan.

BEBERAPA PEMIKIRAN BAGI PENGEMBANGAN SIPT KEDEPAN

Salah satu program pemerintah yang ditujukan mendukung program swasembada daging adalah program CLS. Program ini merupakan produksi terpadu dengan prinsip *zero waste*. Tetapi program tidak dapat dikatakan berhasil karena sebagian daerah yang menerima program tidak dapat menjalankan prinsip ini dan pada akhirnya kembali kepada bentuk tradisional. Selain itu, program ini berskala kecil dan masih bersifat trial and error sehingga tidak dapat diharapkan langsung efektif mendukung progra swasembada. Model-model penggemukan sapi yang lain yang umum dilakukan adalah penggemukan yang sifatnya mandiri dan berbentuk koperasi. Penggemukan yang bersifat kontrak tidak ada lagi.

Pembangunan peternakan masa mendatang haruslah menggunakan pendekatan industri sapi potong. Dengan kata lain pemerintah harus meninggalkan cara-cara lama dalam pengembangan peternakan, seperti strategi dan program yang difokuskan pada usaha sapi potong rakyat. Sudah terbukti selama 20 tahun pembangunan peternakan dengan strategi membangun usaha rakyat ternyata tidak berhasil. Pertimbangan lain usaha rakyat bersifat tradisional, ekstensif, jauh dari kerangka pembangunan industri agribisnis sapi potong.

Ada dua cara yang saat ini dapat segera dilakukan yakni pertama pemerintah memfokuskan program-program pembangunan peternakan untuk meningkatkan kemampuan usaha ternak skala kecil (bukan usaha rakyat) yang bersifat komersil hingga skala menengah. Program-program pemerintah hampir diseluruh Indonesia fokus pada pembangunan usaha rakyat. Untuk itu, pemerintah di wilayah otonom (Kabupaten) diharapkan melakukan pendataan tentang keberadaan usaha penggemukan skala kecil dan skala menengah ini. Langkah selanjutnya adalah membuat kebijakan pembangunan peternakan komersil di wilayahnya masing-masing. Secara nasional, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif seperti penyediaan pelayanan investasi yang cukup, memberikan porsi perhatian yang tinggi terhadap pembangunan peternakan.

Program-proram yang selama ini diterapkan seperti IB, program bantuan seperti CLS, BLM, Ketahanan Pangan dan sebagainya sebaiknya difokuskan pada wilayah sentra produksi sehingga program-program itu mempunyai skala yang besar dan diharapkan dapat mempengaruhi secara efektif terhadap populasi dan produktivitas di wilayah produksi. Kebiasaan membagikan program-program berdasarkan pemerataan di seluruh tempat sebaiknya tidak dilakukan lagi. Program-program diimplementasikan pada wilayah-wilayah yang diunggulkan.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah rekomendasi bagi program SIPT, artinya *Pertama*, implementasi program untuk masa datang harus melibatkan daerah dan khususnya para penerima proyek. Pemerintah sebaiknya meninggalkan pendekatan "top down" yang menganggap semua daerah penerima proyek adalah sama dan menggantikannya dengan pendekatan partisipatif. *Kedua*, program-program tersebut harus difokuskan pada WSP (wilayah sentra produksi)

dan jumlahnya harus diperbesar sampai pada suatu ukuran dapat menjawab masalah produktivitas, populasi dan pendapatan peternak pada tingkat proyek. Jenis program untuk tujuan yang sama tidak perlu berbentuk sama, apalagi kalau program seperti CLS yang sangat tergantung akan keberadaan lahan pertanian yang mungkin tidak sesuai untuk wilayah-wilayah seperti NTT dan NTB.

Bagi peran usaha rakyat dalam produksi daging nasional secara bertahap akan terus menurun. Oleh karena itu, struktur industri harus dikembangkan diluar usaha rakyat dan tradisional saat ini. Usaha rakyat yang ada sekarang ini dapat dijadikan bumper untuk membangun industri peternakan dari skala kecil hingga mengalami pertumbuhan dalam jangka panjang. Hal yang perlu dilakukan untuk menggeser struktur produksi dari yang ada sekarang adalah peluang investasi yang lebih besar untuk usaha sapi potong dan menggerakkan investasi untuk pengadaan pakan hijauan bagi penyelamatan industri sapi potong rakyat yang ada sekarang. Dengan menjadikan usaha rakyat yang ada sekarang menjadi bumper, maka industri peternakan modern dapat dimulai dengan segera tanpa harus khawatir menunggu produksi untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

PENUTUP

Salah satu program pemerintah yang ditujukan mendukung program swasembada daging adalah program CLS. Program ini merupakan produksi terpadu dengan prinsip *zero waste*. Tetapi program tidak dapat dikatakan berhasil karena sebagian daerah yang menerima program tidak dapat menjalankan prinsip ini dan pada akhirnya kembali kepada bentuk tradisional. Selain itu, program ini berskala kecil dan masih bersifat *trial and error* sehingga tidak dapat diharapkan langsung efektif mendukung program swasembada daging. Model-model penggemukan sapi yang lain yang umum dilakukan adalah penggemukan yang sifatnya mandiri dan berbentuk koperasi. Penggemukan yang bersifat kontrak tidak ada lagi.

Pembangunan peternakan masa mendatang haruslah menggunakan pendekatan industri sapi potong. Ada dua cara yang saat ini dapat segera dilakukan yakni pertama pemerintah memfokuskan program-program pembangunan peternakan untuk meningkatkan kemampuan usaha ternak skala kecil (bukan usaha rakyat) yang bersifat komersil hingga skala menengah. Program-program pemerintah hampir di seluruh Indonesia fokus pada pembangunan usaha rakyat. Untuk itu, pemerintah di wilayah otonom (Kabupaten) diharapkan melakukan pendataan tentang keberadaan usaha penggemukan skala kecil dan skala menengah ini. Langkah selanjutnya adalah membuat kebijakan pembangunan peternakan komersil di wilayahnya masing-masing. Secara nasional, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif seperti penyediaan pelayanan investasi yang cukup, memberikan porsi perhatian yang tinggi terhadap pembangunan peternakan.

Program-program yang selama ini diterapkan seperti IB, program bantuan seperti CLS, BLM, Ketahanan Pangan dan sebagainya sebaiknya difokuskan pada wilayah sentra produksi sehingga program-program itu mempunyai skala yang besar dan diharapkan dapat mempengaruhi secara efektif terhadap populasi dan produktivitas di wilayah produksi. Kebiasaan membagikan program-program berdasarkan pemerataan di seluruh tempat sebaiknya tidak dilakukan lagi. Program-program diimplementasikan pada wilayah-wilayah yang diunggulkan.

Peran usaha rakyat dalam produksi daging nasional secara bertahap akan terus menurun. Oleh karena itu, struktur industri harus dikembangkan diluar usaha rakyat dan tradisional saat ini. Usaha rakyat yang ada sekarang ini dapat dijadikan bumper untuk membangun industri peternakan dari skala kecil hingga mengalami pertumbuhan dalam jangka panjang. Hal yang perlu dilakukan untuk menggeser struktur produksi dari yang ada sekarang adalah peluang investasi yang lebih besar untuk usaha sapi potong dan menggerakkan investasi untuk pengadaan pakan hijauan bagi penyelamatan industri sapi potong rakyat yang ada sekarang. Dengan menjadikan usaha rakyat yang ada sekarang menjadi bumper, maka industri peternakan modern dapat dimulai dengan segera tanpa harus khawatir menunggu produksi untuk memenuhi konsumsi dalam negeri.

Agar lebih berhasilnya dalam pencapaian swasembada daging Output yang dihasilkan dalam pelaksanaan program SIPT saat ini memperlihatkan bahwa rumusan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi daging mengandung banyak kelemahan. Sebenarnya pelaksanaan program SIPT mempunyai potensi untuk digunakan dalam perumusan kebijakan peningkatan produksi daging untuk tahun 2005 dan seterusnya. Sehingga paling tidak kegagalan yang sama tidak perlu lagi terjadi. Apabila saran-saran kebijakan yang disampaikan dalam evaluasi pemikiran ini dapat dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan, maka formula kebijakan peningkatan produksi daging sapi masa datang akan lebih mantap dan efektif. Program SIPT ini juga mempunyai potensi bagi organisasi-organisasi profesional yang mempunyai kaitan dengan pembangunan pertanian khususnya peternakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana MO., Gunawan M., Ilham N., Saktyanu KD., Kariyasa K., Sadikin I., dan Djulin AM. 1996. Prospek dan Kendala Agribisnis Peternakan Dalam Era Perdagangan Pasar Bebas. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Dinas Peternakan Kabupaten Blitar. 2003. Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Sistem Integrasi Padi-Ternak di Kabupaten Blitar.
- Direktorak Jenderal Bina Produksi Peternakan. 2002. Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbisnis Berbasis Peternakan.

- Hayanto. B., I. Inounu., Arsana. B dan K. Diwyanto. 2002. Sistem Integrasi Padi-Ternak. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta
- Pakpahan A., Sumaryanto, Syafa'at N., Saliem HP., Friyatno S. dan Saktyanu KD. 1993. Analisis Kebijakan Konversi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian; Badan Litbang Pertanian.
- Panayotou, Theodore. 1985. Food Policy Analysis in Thailand. Agricultural Development Council. Bangkok.
- Rasa. T. R. 2002. Sapipun Dimitrakan. Trobos No. 33/Thn III p.32-33. PT. Permata Wacana Lestari. Jakarta.
- Sudarjat, S. 1999. Ketahanan Pangan 2005. Poultry Indonesia. Oktober 1999. p8-13. Jakarta
- Sudarjat, S. 2003. Operasionalisasi Program Terobosan Menuju Kecukupan Daging Sapi Tahun 2005. Jur: Analisis Kebijakan Pertanian (AKP). Vol 1 No 1. p 23-45. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Yusdja Yusmichad, Rosmijati Sayuti, Bambang Winarso, Ikin Sadikin dan Chairul Muslim. 2004. Pemantapan Program Dan Strategi Kebijakan Peningkatan Produksi Daging Sapi. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Departemen Pertanian.